



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULFIKRI
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 204641

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.693.315.045**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/57 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/29 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. Bangunan Seluas 26 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 1157 m²/35 m² di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 31.8 m²/26.08 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 562.860.500
6. Tanah dan Bangunan Seluas 33.6 m²/27.56 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 640.454.545

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 207.500.000**

1. MOBIL, SUZUKI JEEP Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NOUVO SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOTOR, YAMAHA LEXAM SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000



5. MOTOR, YAMAHA VEGA ZR SEPEDA MOTOR Tahun 2011,
HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	262.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	500
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.310.740.661
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.473.556.206
III. HUTANG	Rp.	6.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.467.556.206

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.